

**ANALISIS YURIDIS ATAS TUNTUTAN SUAMI TERHADAP HARTA BAWAAN  
ISTRI YANG DIPEROLEH SEMASA PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO.146/Pdt.G/2014/PN.Dps)**

**YENITA MARTHA PANDIANGAN**

**ABSTRACT**

*In public opinion, joint property is the property which is obtained by a married couple so that when there is a divorce there will be the claim on it by both of them. If there is no agreement before a marriage occurs and a divorce takes place, there will be a dispute on it between husband and wife. In this case, each of the couple claims that the property is his or hers. Each of them (the widower or the widow) thinks that he or she has the right on the joint property. The legal provision on the property (land and building) given by the wife's parents during the case of marriage when there is a divorce in which the husband claims that it is a joint property. It also analyzes legal protection for the ex-husband who claims that he has the right on the property given by his wife's parents during their marriage. The result of the research showed that in the Marriage Law, there is no detailed explanation on joint property and pre-marital property. In the case of joint property in which each of the married couple thinks that the disputed property does not belong to joint property is determined by the capacity and the success of the plaintiff and the defendant in proving that the disputed property has been obtained during the marriage whether the money which has been used to buy it comes from his or her own effort or it comes from their mutual effort.*

**Keywords:** *Claim, Pre-marital property*

## **1. Pendahuluan**

Suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas, antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan di dapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya, tidaklah mudah bagi pasangan suami istri untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Banyaknya persoalan yang dihadapi dalam suatu ikatan perkawinan sering berujung dalam suatu perceraian. Dalam suatu perceraian selain persoalan anak, persoalan harta biasanya menjadi suatu masalah yang banyak menyita perhatian dan waktu

---

<sup>1</sup> Ria Desvianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, (Tesis Pasca Sarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010), hal. 4-5.

antara pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Dalam suatu perceraian, jika tidak ada perjanjian kawin sebelumnya, maka persoalan pembagian harta perkawinan akan menimbulkan sengketa antara suami dan istri yang bercerai.

Perbincangan seputar masalah harta yang di dapat dalam perkawinan oleh suami dan istri masih dianggap tabu di mata masyarakat. Masyarakat umumnya masih memandang hal ini bukan hal yang penting. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta gono gini, merupakan bagian atau hak-haknya.”<sup>2</sup>

Dalam salah satu contoh kasus perkara gugatan harta bersama yang diajukan di PN.Denpasar Bali, seorang laki-laki, HH ( WNI keturunan Tionghoa) melakukan hidup bersama dengan LT (WNI keturunan Tionghoa) pada tahun 1989 dan dari hidup bersama tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak laki-laki. Pada tahun 1995 pasangan hidup bersama tersebut menikah resmi di Kantor Catatan Sipil Denpasar dan dari pernikahan mereka lahir seorang anak perempuan.

Pernikahan HH dengan LT berakhir dengan perceraian. Selama perkawinan mereka, telah diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus limapuluh meter persegi) dan diatasnya dibangun sebuah bangunan permanen. Setelah perceraian putus, HH menuntut harta berupa tanah dan bangunan tersebut untuk dibagi sama karena menurut HH tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama mereka karena diperoleh pada masa perkawinan masih berlangsung. Gugatan HH sebagai mantan suami mendapat bantahan dari LT (sebagai mantan istri), dengan menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang digugat bukanlah harta bersama tetapi harta yang dibeli dan dibangun dari pembiayaan ibu kandung LT yang menetap di Taiwan yang bernama YT.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum harta bersama suami isteri dalam suatu perkawinan bila terjadi perceraian?

---

<sup>2</sup> Rahman Marwanto, *Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hal. 56

2. Bagaimana status kepemilikan harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh istri dari orangtuanya selama masa perkawinan berlangsung yang kemudian terjadi perceraian dimana suami menuntut hak bersama?
3. Bagaimana perlindungan hukum mantan suami yang menganggap ada hak bersama pada harta bawaan mantan istri yang diperoleh semasa perkawinan masih berlangsung ?

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum harta bersama suami isteri dalam suatu perkawinan bila terjadi perceraian
2. Untuk mengetahui status kepemilikan harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh istri dari orangtuanya selama masa perkawinan berlangsung yang kemudian terjadi perceraian dimana suami menuntut hak bersama
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum mantan suami yang menganggap ada hak bersama atas harta bawaan mantan istri yang diperoleh semasa perkawinan masih berlangsung.

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisa dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan<sup>3</sup>.

### **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari salinan resmi putusan perkara yang dibahas serta hasil wawancara dengan narasumber utama yaitu Ketua Hakim Majelis

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni,1994), hal. 101

Pengadilan Negri Denpasar yang memutus perkara dalam studi putusan penulisan ini dengan memperhatikan pedoman wawancara.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>4</sup>

Adapun data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Agraria
- 5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karangan dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>5</sup>

- c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan seterusnya.<sup>6</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan atau menggali informasi dan catatan lapangan yang diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

### **III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.11

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>6</sup> *Ibid*

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan Warga Negara Indonesia yakni antara lain : <sup>7</sup>

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, jika melaksanakan perkawinan, berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu, dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu Bali yang dianutnya.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCHI) S.1993 No.74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka masing-masing, yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau lainnya yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

---

<sup>7</sup>M. Yamin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim*, Makalah Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, diterbitkan dalam website: <http://respository.usu.ac.id/biststrem/123456789/30789/4/chapter%.201.pdf>

Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara efektif pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka seperti yang dikatakan dalam Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“semua ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling opgemeng de Huwelijken* S.19898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi.”<sup>8</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)).<sup>9</sup> Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekwensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”<sup>10</sup>

Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional (UU No.1 thn 1974) maka berlakulah pula masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian dan masalah pembagian harta perkawinan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa pengaturan hukum harta perkawinan yang ada di Indonesia meskipun sudah diberlakukan hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetapi masih dimungkinkan untuk diberlakukan kembali oleh pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nasional, yang mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>8</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66

<sup>9</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hal. 104

<sup>10</sup> *Ibid*

### **A.Pengaturan Harta Bersama menurut KUH Perdata.**

Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain.”<sup>11</sup> Menurut KUH Perdata, apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 120 jo 121 BW diatur bahwa persatuan bulat itu meliputi :<sup>13</sup>

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil perkawinan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan
3. Utang-utang suami / istri sebelum dan sesudah perkawinan
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan

Bagaimana kalau ada perjanjian perkawinan? Pasal 139 KUH Perdata menentukan bahwa para calon suami-istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama (persatuan bulat), sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan ketentuan-ketentuan berikut (pasal-pasal selanjutnya dalam Bab tentang perjanjian kawin).<sup>14</sup>

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, pasal 128 mengatur : Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.<sup>15</sup>

Jadi harta perkawinan dalam KUH Perdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana pencampuran harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama perkawinan meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Harta persatuan bulat terjadi bilamana perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin memberi ruang untuk terpisahnya harta masing-masing suami dan istri di dalam

---

<sup>11</sup> KUH Perdata, Pasal 119 ayat (1)

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Abadi, 2002),hal.38-39

<sup>13</sup> Djaja B. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hal. 64

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> KUH Perdata Pasal 128

perkawinan, hak milik berikut hutang dan piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.

## **B. Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan, harta pencarian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah.<sup>16</sup>

Mengenai kedudukan harta perkawinan, tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental / bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.<sup>17</sup>

Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan membayar jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai.<sup>18</sup> Pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan). Semua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga / rumah tangga.<sup>19</sup> Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui suami, isteri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan di antara harta bersama atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan.”<sup>20</sup>

Pada golongan masyarakat matrilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan isteri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai

---

<sup>16</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hal. 7

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.123-124

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.124

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



suami dan isteri masing-masing.<sup>21</sup> Jika terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai harta pencarian / harta bersama, sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan (*rejang*, harta pembujangan yang dibawa pria/bujang dan harta pergantian yang dibawa wanita / gadis) termasuk yang berasal dari hadiah harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama.<sup>22</sup> Itupun jika perkawinannya berbentuk semanda antara suami isteri yang bermartabat sama kedudukan (*Rejang*, kawin semendo beradat), seperti “*semendo tambik anak beradat*” dan ‘*semendo rajo-rajo*’.<sup>23</sup> Jika perkawinan dilakukan dalam bentuk semanda tidak beradat (*Rejang*, *semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam*), maka *harta pasuarangan* (harta bersama) itu tidak ada (Abdillah Siddik, 1980:301). Hal mana mirip dengan perkawinan ‘*semenda mati manuk mati tungu*’ di Lampung Pesisir, atau juga perkawinan ‘*nyalindung ke gelung*’ di Pasundan atau ‘*manggih kaya*’ di Jawa.<sup>24</sup>

Dalam masyarakat parental atau bilateral yang menempatkan peranan rumah tangga dipimpin oleh suami dan isteri secara bersama-sama karena diantara keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri, sementara harta bawaan atau harta asal tetap dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri.<sup>25</sup> Hukum adat di setiap daerah mempunyai persepsi yang sama mengenai harta gono gini, tetapi dalam konteks budaya lokal terdapat perbedaan dalam penerapannya.<sup>26</sup>

Hampir seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta yang dimiliki suami istri merupakan kesatuan harta kekayaan yang termasuk dalam harta bersama, hanya harta benda yang diperoleh secara bersama oleh suami dan istri sejak terjadinya ikatan perkawinan itu sajalah yang digolongkan sebagai harta bersama. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadi ikatan perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki oleh masing-masing suami istri.<sup>27</sup>

### **C. Pengaturan Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.125

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hal.8

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>27</sup> Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 44-45

Dalam Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan tentang Hukum Harta Perkawinan diatur hanya dalam beberapa pasal saja, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 serta Pasal 65 dalam ketentuan peralihan aturan perihal suami yang beristri lebih dari seorang.

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh dan dihasilkan secara bersama-sama oleh suami maupun isteri selama dalam ikatan perkawinan, sehingga legalitasnya diakui oleh hukum positif khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>28</sup> Sebaliknya yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan (harta perolehan, harta hibah, hadiah dan sedekah).<sup>29</sup>

Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atau persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami, isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada kenyataannya harta bersama yang dimuat dalam UUP sebenarnya sudah lama dikenal di dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Di Aceh dikenal dengan nama *Hareuta Sihareukat* atau *Hareuta Syarikat*. Di Minangkabau disebut harta *Suarang*. Di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Barang Sekaya* atau *Kaya Reujeung* atau *Raja Kaya* (di Kabupaten Sumedang) atau *Sarikat* (di Kabupaten Kuningan) atau *Harta Pencaharian* (di Jakarta).<sup>30</sup> Di Jawa dinamakan *Barang Guna* atau *Gono Gini*. Di Bali disebut *Druwegabro*. Di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan* dan di Sulawesi Selatan

---

<sup>28</sup> H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2005, hal. 63-64

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> H.Ismuha, *Pencaharian Harta Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hal. 153

(Bugis dan Makassar) dikenal dengan nama *Barang Cakra* sedang di Madura dikenal dengan nama *Ghuna Ghana*.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam pasal 35 UUP, pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum Adat, dimana dalam hukum Adat itu dibedakan dalam harta gono gini yang menjadi milik bersama suami istri dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri.<sup>32</sup> Diikutinya sistem hukum Adat oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum Adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>33</sup>

Dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>34</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Hal ini menyatakan bahwa pengaturan harta bersama jika terjadi perceraian dan harta bersama diperebutkan, peraturan hukumnya belum seragam. Masih terdapat pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. . Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama resmi yang diakui pemerintah (Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik dan Kong Hu cu) dan juga berbagai macam budaya dan hukum adat dengan system kekerabatannya masing-masing yang hingga kini masih hidup di masyarakat Indonesia. Sebutaan “hukum lainnya” dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menambah deretan pilihan hukum bagi suami istri yang bercerai dan mempersoalkan harta bersama.

Menanggapi hal tersebut di atas, M Yahya Harahap berpendapat : “Bahwa pemikiran pembuat Undang-Undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan Hakim, yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat, untuk dituangkan dalam hukum obyektif.”<sup>35</sup>

Jadi, terhadap hukum yang belum jelas (Pasal 37 UU Perkawinan) tersebut, Hakim harus melakukan penafsiran hukum atas Undang-Undang tersebut dengan metode (cara) penafsiran yang selazimnya berlaku dalam ilmu hukum. Seandainya dalam menemukan hukumnya Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> R. Purwoto S, *Renungan Hukum*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998) hal. 449

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan:Zahir Trading Co, 1975) hal. 22

Pancasila, UUD 1945, atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena Hakimlah yang oleh Negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakatnya,<sup>36</sup> sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>37</sup>

Jadi hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum atau undang-undang yang kurang jelas atau peraturannya belum diatur, dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum yang tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan jaman.<sup>38</sup> Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.<sup>39</sup>

Mengenai harta bawaan dan harta perolehan walaupun sudah ditentukan oleh hukum, namun masih terbuka untuk dijadikan harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah mengatur (*aanvullendrecht*).<sup>40</sup> Harta bawaan dapat menjadi harta bersama jika sepasang pengantin (suami istri) menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.<sup>41</sup> Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian

---

<sup>36</sup> Arpani (Hakim PA Kandangan Kalimantan Selatan), *Peranan Hakim Dalam Penemuan dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, diambil dari [www.badilag.net/artikel/ yang diupload](http://www.badilag.net/artikel/yang_diupload) pada hari Jumat, 5 April 2013 pukul 10:44

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1)

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI, *Bina Yustitia* (Jakarta:1994) hal.2

<sup>39</sup> Arpani, *Peranan Hakim Dalam Penemuan dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, diambil dari [www.badilag.net/artikel/diupload](http://www.badilag.net/artikel/diupload) pada hari Jumat, 5 April 2013 pukul 10:44

<sup>40</sup> Tan Kamello Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Buku Pengarang Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 2010, hal.110

<sup>41</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung,1995) hal.

perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>42</sup>

Jadi, berkenaan dengan harta bawaan, bila perkawinan putus baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan, pengaturannya tidak jelas atau tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari berbagai literatur yurisprudensi dan kebiasaan hukum adat, harta bawaan tetap menjadi milik dari masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Jadi suatu perkawinan tidak mempengaruhi kepemilikan dari harta bawaan sepanjang tidak ditentukan lain oleh pasangan suami istri. Bilamana perkawinan putus karena kematian, maka umumnya harta bawaan jatuh pada anak kandung sebagai ahli waris serta pasangan yang hidup terlama. Jika suami atau istri tidak mempunyai anak, maka harta bawaan yang meninggal dikuasai oleh pasangannya yang masih hidup.

### **Status Kepemilikan Harta Berupa Tanah dan Bangunan Yang Diperoleh Dari Pembiayaan Orangtua Istri Selama Masa Perkawinan Berlangsung.**

Hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun.<sup>43</sup> Amandemen, Pasal 28 H butir (4) mengatur : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”<sup>44</sup>

Dalam UU Pokok Agraria ( UU No.5 Tahun 1960 ) Pasal 20 disebutkan bahwa :<sup>45</sup>

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (fungsi sosial)
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Perkataan “setiap orang” terhadap kepemilikan tanah dengan hak milik, adalah terbatas pada Warga Negara Indonesia saja, karena prinsip nasionalitas dalam Pasal 21 ayat (1) UU

---

<sup>42</sup> <http://hukum-kompasiana.com/2010/11/06/tentang-harta-bawaan-sebuah-catatan-316877.html>.

<sup>43</sup> <http://kbbi.web.id/hak>

<sup>44</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H Butir (4)55

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Pokok Hukum Agraria, Pasal 20

Pokok Agraria disebutkan dengan tegas bahwa “Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik.”<sup>46</sup>

Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur pula penegasan akan hak kepemilikan bagi setiap orang yaitu : <sup>47</sup>

- a. Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- b. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- c. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Perkataan “setiap orang” juga dimaknai dengan persamaan hak perempuan dan laki-laki, jadi tanpa membedakan gender, perempuan berhak melakukan tindakan untuk kepemilikan atas tanah, berbeda jauh dengan ketentuan dalam KUH Pedata dimana perempuan (istri) tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Kesetaraan hak dan kedudukan perempuan (sebagai istri) dalam Pasal 51 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, diatur ketentuan sebagai berikut : <sup>48</sup>

- 1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa “Harta yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan terhadap harta bersama itu, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Setiap harta bersama akan dimiliki secara bersama-sama (kepemilikan bersama). Setiap kegunaan dan kemanfaatan dari

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Pokok Hukum Agraria, Pasal 21 Ayat (1)

<sup>47</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51.

harta bersama itu dinikmati secara bersama-sama pula oleh pasangan suami istri yang memiliki harta bersama.

Terhadap harta bawaan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2), bahwa : “Suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing.” Ketentuan ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yaitu bahwa : “Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Jadi siapa saja tanpa adanya pengecualian berhak mempunyai hak milik atas suatu benda, tetapi terhadap kepemilikan hak atas tanah, hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak milik (hak penuh) atas tanah. Terhadap hak milik seseorang atas suatu harta bendanya, Pemerintah sebagai aparatur Negara, memberikan tanda bukti hak kepemilikan setelah melalui proses pendaftaran administrasi\_ dalam bentuk sertifikat. Terhadap hak atas harta yang berupa tanah dan bangunan, diterbitkanlah sertifikat hak atas tanah kepada pemiliknya apakah itu sebagai hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai dan lain-lainnya.

M.Yamin mengatakan : “Di atas sudah disebutkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak, oleh karena itu telah kelihatan fungsinya bahwa sertifikat itu berguna sebagai “alat bukti”. Alat bukti yang menyatakan tanah ini telah diadministrasi oleh Negara. Dengan dilakukan administrasinya, lalu diberikan buktinya kepada orang yang mengadministrasi tersebut.<sup>49</sup> Bukti atau sertifikat adalah milik seseorang sesuai dengan yang tertera dalam tulisan di dalam sertifikat tadi. Jadi bagi si pemilik tanah , sertifikat tadi adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertifikat tersebut, dan lebih kokoh bila pemegang itu adalah namanya yang tersebut dalam sertifikat.”<sup>50</sup>

Mengenai harta berupa tanah dan bangunan yang dibeli dan dibangun semasa perkawinan, dengan perolehan dana dari orangtua istri, terlebih dahulu akan dibahas apakah harta tersebut tergolong harta bersama atau bukan. Begitu pula tentang hak dan kedudukan suami istri terhadap harta tersebut, apakah suami istri dalam kemanfaatan dan kegunaan dari harta tersebut berhak

---

<sup>49</sup> M. Yamin Lubis dan A.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung:Mandar Maju,2012) hal.204.

<sup>50</sup> *Ibid.*

menikmatinya. Dan bagaimanakah status kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut selama perkawinan masih berjalan.

Di atas sudah diuraikan sebelumnya bahwa baik itu hukum Perdata, hukum Adat maupun Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Jika dilihat dari masa perolehan harta yaitu dalam masa perkawinan masih berlangsung, dengan kata lain, harta tersebut ada pada saat ikatan suami istri belum terputus maka dapat disimpulkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama. Abdul Manan mengatakan bahwa : “ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”<sup>51</sup> Dari definisi harta bersama di atas, muncul pertanyaan apakah setiap harta benda yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung termasuk harta bersama. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh semasa ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut : <sup>52</sup>

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh dalam ikatan perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Dari uraian di atas, terhadap kasus perkara tanah dan bangunan yang dibeli dan dibangun pada masa perkawinan berlangsung, jika dilihat dari keterangan waktu hadirnya harta tersebut, maka dapatlah digolongkan sebagai harta bersama, tetapi jika dilihat dari asal pembiayaannya yaitu dari orangtua istri, maka harta tersebut bukanlah masuk harta bersama. Jika suami menuntut hak bersama, maka suami harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari hasil jerih payahnya bersama mantan istrinya selama ikatan perkawinan mereka belum terputus. Jadi meskipun harta tersebut terdaftar atas nama istrinya, tetapi jika suami mampu dan berhasil membuktikan di persidangan maka akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara apakah harta perkawinan yang disengketakan masuk yurisdiksi harta bersama atau bukan. Harta yang diperoleh selama perkawinan

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama* (Mimbar Hukum, No.33, Tahun VIII hal. 59)

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, log.cit



berlangsung, meskipun terdaftar atas nama suami atau istri, dimana sumber dananya terbukti adalah dari hasil jerih payah bersama suami istri, dimana masing-masing mengakui keberadaan harta tersebut maka secara hukum, kepemilikan harta tersebut adalah hak bersama dari suami istri. Suami istri mempunyai hak yang sama dalam pengurusan, penggunaan dan kepemilikannya. Jika suami atau istri hendak melakukan tindakan atas harta bersama maka harus mendapat persetujuan dari pihak yang lain, jadi harus berdasarkan persetujuan bersama-sama.

Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps, dimana HH (mantan suami) menggugat mantan istrinya LT atas tanah dan bangunan yang diperoleh semasa perkawinan mereka masih berlangsung, diketahui bahwa status kepemilikan tanah (yang menjadi obyek sengketa) pada pendaftaran pertama adalah atas nama IAWA, dimana kemudian terjadi peralihan hak karena sebab jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 201/2010 tanggal 06/08/2010 yang dibuat oleh PPAT (MM) kepada LT. Dalam Akta Jual Beli tersebut, dijelaskan bahwa LT bertindak untuk dirinya sendiri. Menurut pengakuan LT dalam dalil bantahannya terhadap gugatan HH (mantan suami), pembayaran biaya untuk pembelian tanah adalah dari orangtuanya (ibu kandungnya) yang diberikan kepada LT melalui adik kandungnya (LN) yang dikirim melalui transfer Bank ke rekening LT selama beberapa periode. Jual beli tanah yang dilakukan LT adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, meskipun dalam perkawinan LT terikat sebagai istri HH, namun tindakan hukum jual beli tersebut yang terjadi semasa ikatan perkawinan belum putus, LT tidak harus mendapat izin dari HH karena biaya pembelian bukan dari hasil dari jerih payah bersama maupun secara perseorangan HH atau dan LT sebagai suami istri. Jadi dapat dikatakan tanah dan kemudian bangunan yang dibangun diatasnya, adalah bukan harta bersama LT dan HH, melainkan merupakan harta asal (masuk harta bawaan) dari orangtua LT, sehingga berlakulah ketentuan pasal 35 ayat (2) yaitu bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam perkawinan HH dengan LT, tidak ada dibuat perjanjian kawin sehingga harta bawaan tetap menjadi kekuasaan masing-masing dan adanya perkawinan tidak mengakibatkan apa-apa atau tidak mempengaruhi keberadaan harta bawaan untuk tetap dibawah penguasaan masing-masing, dalam hal ini LT tetap sebagai pemegang hak penuh atas tanah yang merupakan harta asal orangtuanya, meskipun perkawinannya berakhir dengan perceraian. Jadi status kepemilikan tanah berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut sepenuhnya adalah tetap

dipegang oleh LT, sehingga LT bebas berbuat terhadap harta asalnya tersebut tanpa harus ada izin atau campur tangan (mantan) suaminya HH. Setelah putusnya perkawinan (perceraian) LT dan HH, hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan LT. Jadi berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli tersebut di atas, hak atas tanah tersebut telah beralih dari IAW ke LT dimana LT melakukan tindakan hukum jual beli tanah dengan IAW berdasarkan atas dan untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa kuasa maupun keterlibatan suaminya (HH) dalam perbuatan hukum jual beli tanah tersebut, dimana LT berbuat sebagai manusia bebas meskipun masih terikat dalam perkawinan dengan HH pada masa perbuatan hukum terjadi, sehingga kepemilikan tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya dapatlah dikatakan adalah sepenuhnya merupakan hak milik dari LT (mantan istri).

**Perlindungan hukum terhadap mantan suami yang menganggap ada hak bersama atas harta bawaan mantan istri yang diperoleh semasa perkawinan masih berlangsung.**

Secara preventif Pemerintah telah memberikan usaha perlindungan kepada pasangan suami istri guna mencegah terjadinya sengketa dalam harta perkawinan yaitu dengan membuka peluang untuk menentukan hukum lain bagi suami istri seputar harta perkawinan yaitu dengan adanya pembuatan perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Meskipun Pemerintah telah memberi aturan dalam harta perkawinan namun dalam UU Perkawinan tersebut, tidak ada penjelasan secara rinci tentang wujud dari harta bersama dan harta bawaan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Tentang harta bawaan, tidak pula ada penjelasan mengenai harta bawaan, apa yang dimaksud dengan harta bawaan, bentuk-bentuknya dan keterangan waktu bilamana suatu harta benda masuk kelompok harta bawaan dan juga perihal ketentuan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian tidak juga dijelaskan secara rinci. Pasal 37 hanya menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Undang-Undang Perkawinan tersebut juga tidak ada mengatur bagaimana menyelesaikan masalah tentang harta bawaan suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan yang kemudian bercampur dengan harta bersama. Pasal-pasal yang ketentuannya tidak jelas ini, akan membawa multitafsir bagi penerapan hukum di lapangan.

Meskipun demikian, Negara harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia.

Jika terjadi sengketa perebutan harta benda perkawinan, maka hukum yang tidak jelas ini diserahkan kepada Hakim dengan melakukan penafsiran hukum berdasarkan rasa keadilan hukum dari hakim yang bersangkutan. Hakim berkewajiban mencari sendiri hukumnya atas suatu perkara yang peraturannya tidak jelas. Meskipun tidaklah mungkin hukum itu dapat memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan orang yang lain karena perlindungan sepenuhnya dari kepentingan-kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang yang lain sebagian atau seluruhnya.

Dalam kasus perkara harta bersama antara HH dengan LT, Putusan PN Denpasar No.146/Pdt.G/2014/PN.Dps, Hakim Majelis memutuskan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat HH (mantan suami) untuk keseluruhan dan menyatakan bahwa harta sengketa berupa tanah seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus limapuluh meter persegi) berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya (Sertifikat Hak Milik No. 10722) dinyatakan sebagai harta asal atau harta bawaan dari Tergugat LT(mantan istri).

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>53</sup>

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>54</sup> Hakim yang memeriksa perkara yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak

---

<sup>53</sup> Retnowulan S dan O.Iskandar, "*Hukum Acara Perdata dan Teori Dan Praktek*", (Bandung, CV.Mandar Maju,2005) Cet.X.hal.59.

<sup>54</sup> *Ibid.*

penggugat atau sebaliknya yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.<sup>55</sup>

Dari kasus di atas, LT (mantan istri) sebagai Tergugat justru yang mendapat perlindungan hukum dari putusan Hakim Pengadilan Negri Denpasar yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, atas gugatan HH (mantan suami) terhadap harta bawaan LT (mantan istri). HH (mantan suami) dinyatakan pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara tersebut. Penggugatpun (mantan suami) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negri Denpasar. Ketua Hakim Majelis, Hadi Masruri,SH,MHum, yang memutus Perkara No.146/Pdt.G/2014/PN.Dps, dalam wawancara langsung atas sengketa harta dalam perkara tersebut berpendapat bahwa harta bersama dan harta bawaan adalah harta yang memiliki perbedaan dalam perlakuannya terhadap suami istri, baik selama masa perkawinan berlangsung maupun pada saat terjadi perceraian.<sup>56</sup>

#### **IV.Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Hukum Harta Perkawinan Nasional belum mengatur secara lengkap masalah harta dalam perkawinan, hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UUP dimana meskipun Pemerintah telah memberi aturan dalam harta perkawinan secara nasional, namun dalam UU Perkawinan tersebut, tidak ada penjelasan secara rinci tentang harta bersama dan Harta Bawaan.
2. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari orangtua istri selama masa perkawinan berlangsung, dimana kemudian terjadi perceraian si suami menuntut harta bersama, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli yang dilakukan istri (LT) dimana istri bertindak atas namanya sendiri dan tanpa ada kuasa dan keterlibatan suami (HH), secara hukum hak atas tanah tersebut telah beralih dari penjual (IWAU) ke pembeli (LT) meski LT masih terikat dalam perkawinan dengan HH pada saat perbuatan hukum terjadi, hak kepemilikan harta tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak milik

---

<sup>55</sup> Deasy Soeikromo,*Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan*, dimuat dalam [https:// repo.unsrat.ac.id](https://repo.unsrat.ac.id)

<sup>56</sup> Wawancara dengan Masruli Hakim Pengadilan Negri Denpasar Pada hari Kamis, 13 Agustus 2015, Pukul 08.00 WIT diruang kerja Hakim di Pengadilan Negri Denpasar

dari LT (mantan istri), tindakan kepengurusan (*beheer*) maupun tindakan kepemilikan (*beshickking*) atas harta berupa tanah dan bangunan tersebut ada sepenuhnya pada istri sepanjang perkawinan maupun setelah bubarnya perkawinannya.

3. Harta bawaan suami atau istri tidak dapat dituntut untuk dibagi bersama bilamana terjadi perceraian karena suami atau istri tidak dapat menuntut harta yang bukan haknya, kecuali suami atau istri dapat membuktikan bahwa dia (suami atau istri) turut serta atau ada andil dalam proses pembelian atau pembiayaan atas perolehan harta tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang lengkap dan akurat bahwa harta yang diperoleh adalah merupakan harta bersama suami dan istri. Pepatah latin berkata “Nemo dat quod non habet” yang artinya bahwa tidak seorangpun dapat memberikan apa yang tidak dipunyainya”, dalam hal ini kepemilikan harta bersama perkawinan, seorang istri atau suami tidak dapat dipaksakan untuk membagi, mengalihkan atau memberikan hak milik bersama kepada pasangannya dimana ia sendiri tidak memiliki harta bersama tersebut.

## **B. Saran**

1. Bahwa perlu kiranya pengaturan yang lebih jelas dan rinci lagi tentang hukum harta dalam perkawinan karena ketidakjelasan pasal-pasal yang mengatur harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 35,36 dan 37) dalam praktek bila terjadi sengketa akan menimbulkan konflik dalam penerapan hukumnya, peraturan hukum mana yang akan diterapkan karena adanya pilihan hukum lain yang disarankan UU Perkawinan bila terjadi perceraian (Pasal 37).
2. Bagi pihak-pihak yang akan beracara di persidangan, baik itu pasangan suami istri yang bercerai, maupun Pengacara/Penasehat Hukumnya masing-masing hendaknya harus dapat mempersiapkan dan memberikan bukti-bukti yang akurat di persidangan, agar dapat memenangkan perkara yang dihadapi.
3. Dan bagi para Hakim juga perlu setiap saat mengasah pengetahuannya di dalam khasanah ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Al Amruzi, Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014

- Desviastanti, Ria, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Pasca Sarjana Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Fajar,Mukti dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Hartono ,Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni,1994
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional* Medan:Zahir Trading Co, 1975
- Ismuha, H., *Pencapaian Harta Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Judiasih, Sonny Dewi, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Refika Aditama, 2015
- Kamello, Tan, dan Andriati, Syarifah Lisa, *Hukum Orang dan Keluarga*, Buku Pengarang Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 2010
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- LubisLubis, M. Yamin dan Lubis, A.Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung:Mandar Maju, 2012
- Mahkamah Agung RI, *Bina Yustitia* Jakarta:1994
- Marwanto, Rahman, *Harta Gono Gini, Sengketa dan Penyelesaiannya Setelah Perceraian*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012
- Meliala, Djaja B., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Abadi, 2002
- S, R. Purwoto, *Renungan Hukum*, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996
- S.Retnowulan dan O.Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV.Mandar Maju,2005, Cet.X
- Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung, 1995

## **B.Internet**

- Arpani (Hakim PA Kandangan Kalsel), *Peranan Hakim Dalam Penemuan dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, diambil dari [www.badilag.net/artikel/diupload](http://www.badilag.net/artikel/diupload) pada hari Jumat, 5 April 2013 pukul 10:44

Yamin M., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh hakim*, Makalah Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, diterbitkan dalam website: <http://respository.usu.ac.id/biststrem/123456789/30789/4/chapter%.201.pdf>  
<http://hukum-kompasiana.com/2010/11/06/tentang-harta-bawaan-sebuah-catatan-316877.html>.  
<https://repo.unsrat.ac.id> , Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan*,  
<http://kbbi.web.id/hak>

### **C.Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

### **D.WAWANCARA**

Wawancara dengan Masruli Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Pada hari Kamis, 13

Agustus 2015, Pukul 08.00 WIT di ruang kerja Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar